

**PENGARUH BELANJA BIDANG INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh

ZIHAN FAUJI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

THE IMPACT OF INFRASTRUCTURE, EDUCATION, AND HEALTH EXPENDITURE ON DISTRICT ECONOMIC GROWTH IN LAMPUNG PROVINCE

By

Zihan Fauji

The purpose of this study is to prove empirically about the influence of government expenditure in infrastructure, education and health on district economic growth. This study uses panel data which is a combination of cross section data and time series data from 2009-2015, conducted by Eviews 9.0. After performing multiple regression analysis using random effect model (REM) on panel data set for 10 district / cities in Lampung Province 2009-2015 period, the result showed that the variable of government expenditure in education sector has positive and significant impact to district economic growth. While the variable of government expenditure in infrastructure and health sector does not have significant impact to district economic growth.

Keywords: budget, district government budget,expenditure infrastructure expenditure, education expenditure,health expenditure, economic growth

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA BIDANG INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ZIHAN FAUJI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Belanja pemerintah daerah di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data kerat lintang (*cross section*) dan data runut waktu (*time series*) periode tahun 2009-2015 yang diolah dengan aplikasi Eviews 9.0. Setelah melakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan *random effect model* (REM) terhadap data panel dari 10 kabupaten/kota dalam periode 2009-2015, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan variabel belanja pemerintah bidang infrastruktur dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci: anggaran, APBD, belanja pemerintah, belanja bidang infrastruktur, belanja bidang pendidikan, belanja bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi

**PENGARUH BELANJA BIDANG INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

ZIHAN FAUJI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH BELANJA BIDANG
INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Zihan Fauji**

Nomor Pokok Mahasiswa: 1511031120

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19700817 199703 2 001

Yuztitya Amaranti, S.E., M.Si.
NIP 19801017 200512 2 002

2. Ketua Jurusan Akuntansi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Farichah', is written over the text of the department head's name.

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

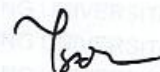
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si, Akt.



Sekretaris : Yuztitya Amaranti, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 September 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2017

Penu



Zihan Fauji

NPM 1511031120

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 1988, sebagai anak pertama dari 2 bersaudara, dari Bapak Bajari dan Ibu Yayah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Sindangmulya 01 pada tahun 2001. Selanjutnya penulis menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Cibarusah pada tahun 2004, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Cikarang Utara hingga lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2008, penulis melanjutkan Pendidikan Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) hingga lulus pada tahun 2011, dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga saat ini. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui program kerja sama Beasiswa yang diselenggarakan oleh BPKP dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung bekerja sama dengan *Asian Development Bank (ADB)*.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi;
4. Bapak Drs. Achmad Zubaidi Indra, M.Si. Akt. selaku Pembimbing Akademik atas kesediaannya membantu, mengarahkan dan memberi masukan selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. sebagai Dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat dalam proses penyelesaian skripsi;
6. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si., Akt. sebagai Dosen Penguji atas masukan dan nasihat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi dan Dekanat FEB atas semua pengajaran, pelayanan dan bantuan yang telah diberikan;
8. Kedua orang tuaku, Bapak Bajari dan Ibu Yayah yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang dan dukungan serta pengorbanan yang dilakukan untuk penulis dengan penuh keikhlasan;
9. Istriku tercinta, Bety Nurjanah atas motivasi, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang selalu tercurah untuk penulis;
10. Sahabat KKN Banjar Agung, Angky Verdian Diputra, Syahadat Muhammad Fakhry, Erwin Pandu Wardana, dan Suhermanto Simanjuntak, terima kasih atas keceriaan yang diberikan selama ini.;
11. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch 2 Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama ini;
12. Ibu Sally Salamah sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung beserta para pejabat struktural dan rekan-rekan pegawai atas dukungan dalam penyelesaian skripsi;
13. Seluruh teman dan kerabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih dukungan dan doanya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Oktober 2017
Penulis,

Zihan Fauji

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Keagenan.....	8
2.1.2 <i>New Public Management (NPM) Theory</i>	10
2.1.3 Belanja Pemerintah Daerah	12
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	15
2.2 Kerangka Pemikiran	17
2.3 Pengembangan Hipotesis	18
2.3.1 Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.3.2 Pengaruh Belanja Bidang Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.3.3 Pengaruh Belanja Bidang Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	20
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Populasi dan Sampel	22
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.3 Model Penelitian	22
3.4 Definisi Operasional Variabel	26
3.4.1 Variabel Independen	26

	3.4.1.1	Belanja Bidang Infrastruktur	26
	3.4.1.2	Belanja Bidang Pendidikan	26
	3.4.1.3	Belanja Bidang Kesehatan.....	27
	3.4.2	Variabel Dependen	27
3.5		Pengolahan Data.....	28
	3.5.1	Pendekatan Model Regresi Data Panel	28
	3.5.2	Pemilihan Model Regresi	30
	3.5.2.1	Uji Chow.....	30
	3.5.2.2	Uji Hausman	31
	3.5.2.3	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	31
	3.5.3	Analisis Statistik Deskriptif	32
	3.5.4	Uji Asumsi Klasik.....	32
	3.5.4.1	Uji Normalitas	33
	3.5.4.2	Uji Multikolinieritas	34
	3.5.4.3	Uji Heteroskedastisitas	35
	3.5.4.4	Uji Autokorelasi	35
3.6		Pengujian Hipotesis.....	36
	3.6.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	36
	3.6.2	Uji Hipotesis (Uji t)	37
	3.6.3	Uji Kelayakan Model Regresi (Uji F)	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1		Statistik Deskriptif.....	39
	4.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	40
	4.1.2	Belanja Bidang Infrastruktur	41
	4.1.3	Belanja Bidang Pendidikan.....	42
	4.1.4	Belanja Bidang Kesehatan.....	43
4.2		Pemilihan Model Regresi	44
	4.2.1	Skema 1 (tanpa <i>lag</i>)	44
	4.2.1.1	<i>Likelihood Ratio Test</i> (Uji Chow)	44
	4.2.1.2	Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM).....	45
	4.2.2	Skema 2 (<i>lag</i> 1 tahun).....	45
	4.2.2.1	<i>Likelihood Ratio Test</i> (Uji Chow)	45
	4.2.2.2	Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM).....	46
	4.2.3	Skema 3 (<i>lag</i> 2 tahun)	47
	4.2.3.1	<i>Likelihood Ratio Test</i> (Uji Chow)	47
	4.2.3.2	Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM).....	47
4.3		Analisis Hasil Regresi Data Panel.....	49
	4.3.1	Hasil Regresi Skema 1 (tanpa <i>lag</i>)	49
	4.3.2	Hasil Regresi Skema 2 (<i>lag</i> 1 tahun)	50
	4.3.3	Hasil Regresi Skema 3 (<i>lag</i> 2 tahun)	52
4.4		Pembahasan	55
	4.4.1	Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	55
	4.4.2	Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	56
	4.4.3	Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	57

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	59
5.2	Keterbatasan Penelitian	60
5.3	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi di Sumatera	2
4.1 Statistik Deskriptif	39
4.2 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i> untuk skema 1 (tanpa lag).....	44
4.3 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM) untuk Skema 1 (tanpa lag).....	45
4.4 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i> untuk Skema 2 (<i>lag</i> 1 tahun).....	46
4.5 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM) untuk Skema 2 (<i>lag</i> 1 tahun).....	46
4.6 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test</i> untuk Skema 3 (<i>lag</i> 2 tahun).....	47
4.7 Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM) untuk Skema 3 (<i>lag</i> 2 tahun).....	48
4.8 Rangkuman Model Pengolahan Terpilih	48
4.9 <i>Estimation Output</i> Hasil Regresi Skema 1	49
4.10 <i>Estimation Output</i> Hasil Regresi Skema 2 (<i>lag</i> 1 tahun).....	51
4.11 <i>Estimation Output</i> Hasil Regresi Skema 3 (<i>lag</i> 2 tahun).....	53
4.12 Rangkuman Hasil Uji Hipotesis	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model Penelitian.....	17
4.1 Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Lampung.....	40
4.2 Rasio alokasi belanja bidang infrastruktur kabupaten/kota di provinsi Lampung.....	41
4.3 Rasio alokasi belanja bidang pendidikan kabupaten/kota di provinsi Lampung.....	42
4.4 Rasio alokasi belanja bidang kesehatan kabupaten/kota di provinsi Lampung.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2015	L-1
2. Data Belanja Bidang Infrastruktur Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2007-2015	L-2
3. Data Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2007-2015	L-3
4. Data Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2007-2015	L-4
5. Data Total Belanja Kabupaten/Kota di Prov. Lampung Tahun 2007-2015..	L-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakikat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih dalam Adi, 2006). Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini pemerintah daerah diharapkan mampu membangun daerahnya secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,79%, angka ini lebih rendah dibanding target pemerintah sebesar 5,8% (BPS, 2016).

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan berbagai permasalahan yang dihadapi ekonomi global. Berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 ini juga merupakan yang terendah selama 6 tahun terakhir dan merupakan kali pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5% sejak 2009 ketika terjadi krisis keuangan global.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera juga cenderung mengalami perlambatan selama kurun waktu 2011-2015. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung tercatat sebesar 6,56%, kemudian terus mengalami perlambatan hingga pada tahun 2015 mencapai angka 5,13%. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung masih berada di atas rata-rata nasional, tapi pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif agar pertumbuhan ekonomi tidak terus melambat, di antaranya adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah demi menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi di Sumatera
Tahun 2011-2015

Provinsi	dalam persen				
	2011	2012	2013	2014	2015
A. Indonesia	6,17	6,03	5,58	5,02	4,79
B. Sumatera	6,19	5,75	4,95	4,58	3,54
Aceh	3,28	3,85	2,61	1,55	-0,72
Sumatera Utara	6,66	6,45	6,07	5,23	5,10
Sumatera Barat	6,34	6,31	6,08	5,86	5,41
Riau	5,57	3,76	2,48	2,70	0,22
Jambi	7,86	7,03	6,84	7,35	4,21
Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,31	4,70	4,50
Bengkulu	6,85	6,83	6,07	5,48	5,14
Lampung	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13
Kep. Bangka Belitung	6,90	5,50	5,20	4,67	4,08
Kep. Riau	6,96	7,63	7,21	6,62	6,02

Sumber: BPS, diolah

Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Anitasari dan Soleh, 2015). Dengan demikian kebijakan pengeluaran pemerintah pada setiap daerah akan tercermin dalam APBD masing-masing dalam bentuk belanja daerah.

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan alokasi anggaran pemerintah daerah yang sesuai kebutuhan daerah dan tepat sasaran. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani dalam Abdullah dan Asmara, 2006).

Pada praktiknya dalam proses penyusunan anggaran pemerintah ini sering terjadi tarik-menarik antara alokasi untuk pengeluaran untuk pembangunan fisik dan pengeluaran untuk pembangunan manusia. Investasi fisik, di satu sisi, dianggap sebagai kebijakan yang ampuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau investasi pembangunan manusia. Meningkatnya perbaikan modal manusia (*human capital*) sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas (Sjafii, 2009). Sementara itu, Weil dalam Maryaningsih, *et al.* (2014) juga menyatakan

bahwa disparitas ketersediaan kapital fisik dan *human capital* berperan dalam menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Menurut Friawan (2008) ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Alasan ketiga adalah perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara.

Penelitian yang dilakukan Babatunde (2016) mengungkapkan bahwa belanja infrastruktur yang dilakukan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi belanja infrastruktur yang dilakukan pemerintah, semakin tinggi pertumbuhannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hendarmin (2012) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari belanja infrastruktur yang dilakukan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ranis, *et al.* (2000) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai berikut, *“Human development has been defined as enlarging people's choices in a way which enables them to lead longer, healthier and fuller lives.”* Secara sederhana pembangunan manusia dapat diartikan sebagai peningkatan kondisi seseorang sehingga memungkinkan hidup lebih panjang sekaligus lebih sehat dan mendapatkan kehidupan yang layak. Menurut Widodo, *et al.* (2011) sekurang-

kurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas pembangunan pemerintah. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 yang mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, untuk pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Undang-undang No. 36 tahun 2009 pasal 171 menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.

Berbagai studi telah membuktikan bahwa modal manusia merupakan salah satu determinan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain antara pendidikan dan kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan saling mempengaruhi (Ranis dalam Sjafii, 2009). Penelitian yang dilakukan Nurudeen dan Usman (2010) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2014) menyatakan

bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. (Hamzah, 2008). Dengan alokasi anggaran yang tepat antara belanja bidang infrastruktur, belanja bidang pendidikan dan belanja bidang kesehatan diharapkan target pertumbuhan ekonomi akan tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, penulis ingin meneliti sejauh mana pengaruh belanja pemerintah di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah belanja pemerintah di bidang infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung?
2. Apakah belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung?
3. Apakah belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh belanja pemerintah di bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung.
2. Pengaruh terhadap belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung.
3. Pengaruh terhadap belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah wawasan bagi pelajar maupun peneliti mengenai pengaruh belanja di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menyumbangkan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan berikutnya dalam hal belanja pemerintah dan memberikan gambaran mengenai pengaruh kebijakan yang dijalankannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan pada sektor publik digunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian anggaran menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi dimana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin dalam Abdullah dan Asmara, 2006).

Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (Abdullah dan Asmara, 2006). Implikasi teori keagenan muncul dalam proses penyusunan anggaran dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari

perspektif hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah principal (Halim dan Abdullah, 2006).

Untuk menjelaskan tentang teori keagenan Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer (agen) sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak mengutamakan kepentingan pribadinya. Sedangkan prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Dengan demikian hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Apabila dilihat dari perspektif hubungan keagenan legislatif dengan rakyat, pihak legislatif adalah agen yang membela kepentingan rakyat (prinsipal), akan tetapi tidak ada kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelegasian kewenangan rakyat terhadap legislatif. Hal inilah yang seringkali menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun oleh legislatif sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat, melainkan cenderung mengutamakan *self-interest* para pihak legislatif tersebut. Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan anggaran yang disahkan adalah alat untuk melancarkan aksi pencurian hak rakyat atau sering dikenal dengan istilah korupsi (Keefer dan Khemani dalam Abdullah dan Asmara, 2006).

Contoh adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal adalah pada penganggaran bidang/sector pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan dan

kesehatan merupakan dua sektor pelayanan publik paling penting dipenuhi oleh pemerintah (Ablo dan Reinikka dalam Abdullah dan Asmara, 2006) sehingga alokasi anggaran untuk kedua sektor ini relatif besar dibanding sektor lain.

Mardiasmo dalam Abdullah dan Asmara (2006) menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk pelayanan publik yang paling mendasar dan karenanya menjadi fokus utama pembelaan legislatif di pemerintahan. Namun, belanja untuk pendidikan dan kesehatan bukanlah area yang dapat memberikan peluang untuk korupsi sehingga anggaran pendidikan, kesehatan, dan sosial akan diperkecil (Gupta, *et al.* dalam Abdullah dan Asmara, 2006). Hal tersebut diperkuat oleh Tanzi dan Davoodi dalam Parwati (2015) yang mengemukakan bahwa belanja investasi publik lebih disukai legislatif karena dapat memberikan komisi lebih besar dari pada belanja untuk pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

2.1.2 *New Public Management (NPM) Theory*

Organisasi sektor publik, khususnya instansi pemerintahan, dalam menjalankan kegiatannya sering dipandang sebagai organisasi yang kurang produktif, tidak efisien, sering merugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas. Stigma terhadap organisasi sektor publik yang sudah melekat sejak lama ini merupakan suatu kritik keras yang harus ditindaklanjuti oleh organisasi sektor publik. Adanya kritik keras yang ditujukan terhadap organisasi-organisasi sektor publik tersebut pada akhirnya menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep *New Public Management (NPM)*.

NPM merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik. Istilah NPM pertama kali dikemukakan Hood (1991) dalam artikelnya “All Public Management of All Seasons”. NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor publik. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. (Hughes dalam Mahmudi, 2003). Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, diharapkan organisasi sektor publik, terutama pemerintah dapat menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien dan efektif.

Menurut Hood (1991) NPM memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Manajemen profesional di sektor publik
2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian *output* dan *outcome*
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
5. Menciptakan persaingan di sektor publik
6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Salah satu pendekatan utama NPM adalah mengelola sektor publik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbasis privat. NPM memperkenalkan manajemen sektor

privat dan metode insentifnya kepada organisasi pemerintahan. Pendukung teori ini berpendapat bahwa penerapan basis metode sektor privat beserta struktur insentifnya kepada pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi (Babatunde, 2016). Oleh karena itu, meskipun tujuan organisasi pemerintah adalah bukan berorientasi profit, pemerintah harus berusaha keras untuk menjalankan program-programnya dengan baik demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak berorientasi profit, tidak banyak rasio sektor privat yang bisa digunakan pada pemerintah. Pengukuran efisiensi atau efektivitas pengeluaran pemerintah bisa dilakukan pada *output* dan *outcome*-nya.

Dengan menerapkan konsep NPM dalam penganggaran pemerintah, diharapkan anggaran yang ditetapkan dapat memenuhi prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu alokasi anggaran yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif dapat tepat sasaran dan menghasilkan *outcome* yang berkualitas.

2.1.3 Belanja Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan

pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja. Untuk memudahkan dalam mengelompokkan klasifikasi belanja sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan klasifikasi belanja menurut fungsi sebagai sumber data. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

Adapun klasifikasi belanja pemerintah menurut fungsi yaitu:

1. Fungsi pelayanan umum; adalah bagian belanja berupa: belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampaknya (*impact*) secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Fungsi ketertiban dan keamanan; dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

3. Fungsi ekonomi; merupakan realisasi anggaran yang dimanfaatkan untuk membiayai program-program sarana dan prasarana transportasi, pertanian, pengairan, dan energi, yang diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi.
4. Fungsi lingkungan hidup; alokasi anggaran pada fungsi Lingkungan hidup dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan untuk menjaga lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
5. Fungsi perumahan dan fasilitas umum; alokasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan perumahan dan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
6. Fungsi kesehatan; alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Realisasi anggaran belanja Pemerintah meliputi realisasi anggaran fungsi kesehatan seperti obat-obatan, pelayanan kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, litbang kesehatan, kesehatan lainnya.
7. Fungsi pariwisata dan budaya; alokasi anggaran pada fungsi kesehatan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pariwisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
8. Fungsi agama; alokasi anggaran pada fungsi agama dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan beragama yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Meliputi peningkatan kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama, litbang agama, pelayanan keagamaan, dll.

9. Fungsi pendidikan; realisasi anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah merupakan realisasi anggaran pada fungsi pendidikan yang terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu: subfungsi pendidikan anak usia dini (PAUD), subfungsi pendidikan dasar, subfungsi pendidikan menengah, subfungsi pendidikan nonformal dan formal, subfungsi pendidikan tinggi, subfungsi pelayanan bantuan terhadap pendidikan, subfungsi pendidikan keagamaan, subfungsi penelitian dan pengembangan pendidikan, dan subfungsi pendidikan lainnya.
10. Fungsi perlindungan sosial; alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti, perlindungan sosial, pelayanan sosial, pelayanan keuangan sosial, pemberdayaan perempuan, bantuan perumahan, dan lain-lain.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1996: 33), pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan *output* perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Model pertumbuhan ekonomi yang umum digunakan sebagai acuan adalah *exogenous growth* model atau *Solow growth model*. Model Solow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh perubahan

faktor produksi modal fisik (tabungan dan investasi) dan tenaga kerja (pertumbuhan populasi), sementara teknologi yang menggambarkan tingkat efisiensi merupakan variabel eksogen dan dianggap sebagai residual (Maryaningsih, *et al.*, 2014). Model Solow merupakan pengembangan dari model pertumbuhan Harrod-Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi kedalam persamaan pertumbuhan. Tenaga kerja dan modal diasumsikan mengalami *diminishing returns* jika keduanya dianalisis secara terpisah dan *constant returns to scale* apabila keduanya dianalisis secara bersama-sama (Todaro dan Smith dalam Maryaningsih, *et.al*, 2014).

Model pertumbuhan Solow memakai fungsi produksi agregat, yaitu:

$$Y = A K^\alpha L^{1-\alpha}$$

dengan:

Y : Produk Domestik Bruto (PDB)

K : Stok modal fisik dan modal manusia

L : Tenaga kerja

A : Tingkat kemajuan teknologi

α : Elastisitas *output* terhadap modal

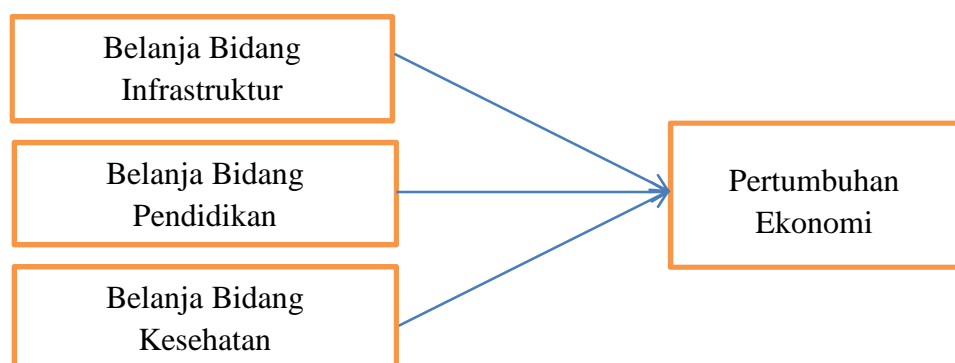
Dari persamaan di atas, dapat kita ketahui bahwa model pertumbuhan Solow menekankan pentingnya peranan investasi baik modal fisik maupun modal manusia dalam menentukan pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dalam PDB. Laju pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat akumulasi kapital per tenaga kerja. Berdasarkan model ini, daerah yang memiliki akumulasi kapital lebih baik akan tumbuh lebih tinggi (Maryaningsih, *et al.*, 2014).

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewenangan ini memungkinkan percepatan pembangunan, karena pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi daerahnya, terutama dalam penyusunan APBD.

Namun demikian, perbedaan potensi keuangan antar daerah dapat menyebabkan terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi antar satu daerah dengan yang lain. Oleh karena itu masing-masing pemerintah daerah harus menerapkan formula yang jitu dalam penyusunan anggarannya, agar dapat dihasilkan porsi alokasi yang tepat terkait anggaran untuk pembangunan fisik dan pembangunan manusia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai kesuksesan suatu pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Pengeluaran di bidang infrastruktur dipercaya dapat menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Keefe and Khemani dalam Abdullah dan Asmara (2006) menemukan bahwa pengalokasian anggaran akan lebih banyak diarahkan untuk proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan janji legislatif kepada pemilihnya. Maryaningsih, *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur jalan dan listrik berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, namun tidak demikian dengan pelabuhan. Adi (2006) menemukan bahwa belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan yang baik memerlukan pengeluaran di bidang infrastruktur yang layak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat (Babatunde, 2016).

Anitasari dan Sholeh (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di

provinsi Bengkulu. Hipotesis yang dikembangkan dari pemaparan ini adalah sebagai berikut:

H1: Belanja bidang infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

2.3.2 Pengaruh Belanja Bidang Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Widodo, *et al.* (2011) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu Negara, dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak menjelaskan pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Mekdad, *et al.* (2014) tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Al-Jazair mengungkapkan

bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Nurudeen dan Usman (2010) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi sumber daya manusia, yaitu belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Liu, *et al.* 2008). Investasi sektor publik untuk pembangunan manusia yakni pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tampak dari Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan manusia itu sendiri akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal (Sjafii, 2009).

H₂: Belanja bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

2.3.3 Pengaruh Belanja Bidang Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital dan merupakan input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun *output* menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro dalam sjafii, 2009).

Penelitian yang dilakukan Santoso, *et al.* (2013) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten/kota sektor kesehatan dan pendidikan secara serempak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia. Bakare dan Olubokun (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa

pengeluaran di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Belanja bidang kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang dikembangkan dari pemaparan ini adalah sebagai berikut:

H3: Belanja bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah menerbitkan laporan keuangan sejak tahun 2007. Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu set data yang berisi data sampel pada sebuah periode tertentu. Dengan kata lain data panel merupakan gabungan antara data kerat lintang (*cross section*) yang terdiri dari 10 kabupaten dan kota di provinsi Lampung, serta data runut waktu (*time series*) periode tahun 2009-2015.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari BPS provinsi Lampung; *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI; dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten/kota yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Unit analisis penelitian ini untuk seluruh variabel (independen dan dependen) adalah kabupaten/kota di provinsi Lampung.

3.3 Model Penelitian

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen, yaitu pengaruh belanja pemerintah di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada akan digunakan model regresi data panel. Adapun model umumnya adalah sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} + \beta_3 X_{3i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$Y_{i,t}$ = Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota i dan tahun t

$\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Konstanta masing-masing variabel bebas

$X_{i,t}$ = Realisasi belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur pada kabupaten/kota i dan tahun t

$X_{2i,t}$ = Realisasi belanja pemerintah daerah sektor pendidikan pada kabupaten/kota i dan tahun t

$X_{3i,t}$ = Realisasi belanja pemerintah daerah untuk kesehatan pada kabupaten/kota i dan tahun t
 = *error term*/derajat kesalahan model

i = data *cross section*, yaitu 10 kabupaten/kota di Provinsi Lampung

t = tahun penelitian, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2015

Sebagaimana lazimnya sebuah kebijakan, pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat langsung dilihat hasilnya, melainkan memerlukan waktu (*time lag*). Selain itu, proyek pemerintah juga adakalanya melebihi jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi satu atau dua tahun berikutnya.

Dengan menggunakan *lag* 1 tahun, model regresinya menjadi sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{1i,t-1} + \beta_2 X_{2i,t-1} + \beta_3 X_{3i,t-1} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$Y_{i,t}$ = Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota i dan tahun t

$\beta_{1,2,3}$ = Konstanta masing-masing variabel bebas

$X_{1i,t-1}$ = Realisasi belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur pada kabupaten/kota i dan tahun $t-1$

$X_{2i,t-1}$ = Realisasi belanja pemerintah daerah sektor pendidikan pada kabupaten/kota i dan tahun $t-1$

$X_{3i,t-1}$ = Realisasi belanja pemerintah daerah untuk kesehatan pada kabupaten/kota i dan tahun $t-1$
 = *error term*/derajat kesalahan model

i = data *cross section*, yaitu 10 kabupaten/kota di Provinsi Lampung

t = tahun penelitian, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2015

Dengan cara yang sama, model regresi menggunakan *lag 2* tahun menjadi sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{1i,t-2} + \beta_2 X_{2i,t-2} + \beta_3 X_{3i,t-2} + \epsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$Y_{i,t}$ = Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota i dan tahun t

$\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Konstanta masing-masing variabel bebas

$X_{1i,t-2}$ = Realisasi belanja pemerintah daerah sektor infrastruktur pada kabupaten/kota i dan tahun $t-2$

$X_{2i,t-2}$ = Realisasi belanja pemerintah daerah sektor pendidikan pada kabupaten/kota i dan tahun $t-2$

$X_{3i,t-2}$ = Realisasi belanja pemerintah daerah untuk kesehatan pada kabupaten/kota i dan tahun $t-2$
 = *error term*/derajat kesalahan model

i = data *cross section*, yaitu 10 kabupaten/kota di Provinsi Lampung

t = tahun penelitian, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2015

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2016). Variabel independen dari penelitian ini menggunakan klasifikasi belanja berdasarkan fungsi. Ada tiga fungsi yang digunakan sebagai variabel independen, yaitu (1) fungsi perumahan dan fasilitas umum sebagai proksi dari belanja pemerintah di bidang infrastruktur (2) fungsi pendidikan sebagai proksi dari belanja pemerintah di bidang pendidikan (3) fungsi kesehatan sebagai proksi dari belanja pemerintah di bidang kesehatan.

3.4.1.1 Belanja bidang infrastruktur

Belanja bidang infrastruktur merupakan besarnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk bidang infrastruktur yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk bidang infrastruktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio belanja pemerintah daerah fungsi perumahan dan fasilitas umum dibandingkan dengan total belanja di kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2009 – 2015.

3.4.1.2 Belanja bidang pendidikan

Belanja bidang pendidikan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk bidang pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total realisasi belanja daerah yang

dialokasikan untuk bidang pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan dibandingkan dengan total belanja di kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2009 – 2015.

3.4.1.3 Belanja bidang kesehatan

Belanja bidang kesehatan merupakan besarnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk bidang kesehatan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk bidang kesehatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan dibandingkan dengan total belanja di kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2009 – 2015.

3.4.2 Variabel dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode dapat diketahui dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penelitian ini digunakan PDRB tahun 2009 - 2015. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = (\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}) / (\text{PDRB}_{t-1}) \times 100\%$$

3.5 Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti. Data dalam penelitian ini diolah dengan bantuan software statistik *Eviews* versi 9.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang paling baik, dilakukan beberapa tahap prosedur pengolahan data. Data panel menggunakan data yang lebih kompleks dengan jumlah observasi yang rata-rata lebih banyak dibanding *cross section* dan *time series* sehingga diperlukan teknik khusus dalam melakukan pengolahan. Prosedur-prosedur pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Estimasi regresi data panel dengan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*;
2. Uji signifikansi model *common*, *fixed* dan *random effect*;
3. Menentukan model terbaik terhadap data observasi yang dimiliki;
4. Melakukan uji asumsi klasik (untuk model *common* dan *fixed effect*)
5. Uji statistik dengan regresi, uji t-Parsial dan uji F-Simultan;

3.5.1 Pendekatan Model Regresi Data Panel

Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan alat uji statistik *Eviews* 9. Penelitian ini melibatkan kabupaten/kota sebagai *cross section* dan antar tahun menjadi *time series*.

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), dalam melakukan estimasi model regresi

data panel digunakan tiga teknik uji regresi, yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

Common Effect Model merupakan model sederhana yaitu menggabungkan seluruh data *time series* dengan *cross section*, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*). Model ini menganggap bahwa intersep dan slop dari setiap variabel sama untuk setiap obyek observasi. Dengan kata lain, hasil regresi ini dianggap berlaku untuk semua kabupaten/kota pada semua waktu. Kelemahan model ini adalah ketidakseuaian model dengan keadaan sebenarnya. Kondisi tiap obyek dapat berbeda dan kondisi suatu obyek satu waktu dengan waktu yang lain dapat berbeda.

Fixed Effect Model, salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Pendekatan dengan memasukkan variable boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

Random Effect Model (REM), digunakan untuk mengatasi kelemahan model efek tetap yang menggunakan *dummy variable*, sehingga model mengalami ketidakpastian. Penggunaan *dummy variable* akan mengurangi derajat bebas (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. REM menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu, sehingga REM mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel acak.

3.5.2 Pemilihan Model Regresi

Untuk memilih metode mana yang terbaik diantara ketiga metode tersebut antara lain dilakukan dengan uji Chow, uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier*. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara metode *common effect* dan *fixed effect*, sedangkan uji *Hausman* dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* atau *random effect*, dan Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk memilih antara model OLS dan model *random effect*. Pengujian tersebut dilakukan dengan *Eviews 9*.

3.5.2.1 Uji Chow

Dalam melakukan uji Chow, data diregresikan dengan menggunakan *common effect* dan *fixed effect* terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk diuji.

Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

Ho: model *common effect* (model *pool*)

Ha: model *fixed effects*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *probability F* $\geq 0,05$ artinya Ho diterima; maka model yang dipilih adalah model *common effect*, dan dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih apakah menggunakan metode *common effect* atau metode *random effect*.
2. Jika nilai *probability F* $< 0,05$ artinya Ho ditolak; maka modal yang dipilih adalah model *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan metode *fixed effect* atau metode *random effect*.

Namun, uji Hausman tidak perlu dilakukan apabila hasil Uji Chow menunjukkan bahwa H_0 diterima, atau dengan kata lain menyimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam persamaan regresi adalah model *common effect*.

3.5.2.2 Uji Hausman

Selanjutnya untuk melakukan Hausman Test, data juga diregresikan dengan metode *random effect*, kemudian dibandingkan antara *fixed effect* dan *random effect* dengan membuat hipotesis:

H_0 : Model *Random effect*

H_a : Model *fixed effect*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah sebagai berikut:

1. Jika Nilai *probability Chi-Square* $\geq 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya model *random effect*.
2. Jika Nilai *probability Chi-Square* $< 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya model *fixed effect*.

3.5.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect*. Uji Signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh *Breusch-Pagan*. Pengujian didasarkan pada nilai residual dari metode *Common Effect*.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : Model mengikuti *common effect*

H_a : Model mengikuti *random effect*

Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*. Atau dapat dilakukan dengan melihat nilai *probability Cross-section random*. Apabila nilainya berada di atas 0,05 atau tidak signifikan, maka H_0 diterima dan jika berada dibawah 0,05 atau signifikan maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

3.5.3 Analisis Statistik Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu observasi dengan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil observasi. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari *mean*, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi dari data sampel. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran distribusi dan perilaku data sampel penelitian.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan

tidak terdapat multikolonieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

Regresi data panel memberikan alternatif model yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect Model*. Model *Common Effect* menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) dan *Fixed Effect* menggunakan pendekatan *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam teknik estimasinya, sedangkan *Random Effect* menggunakan *Generalized Least Squares* (GLS) sebagai teknik estimasinya.

Menurut Gujarati dan Porter (2009), persamaan yang memenuhi asumsi klasik hanya persamaan yang menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Dalam *Eviews*, model estimasi yang menggunakan metode GLS hanya *random effect model*, sedangkan *fixed effect* dan *common effect* menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini tergantung pada hasil pemilihan metode estimasi. Apabila berdasarkan pemilihan metode estimasi yang sesuai untuk persamaan regresi adalah *random effect*, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan *common effect* atau *fixed effect* (OLS) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Dalam software *Eviews*, normalitas sebuah data dapat diketahui salah satunya dengan membandingkan nilai *Jarque-Bera* (JB) dan nilai *Chi Square* tabel. Uji JB didapat dari histogram normality yang akan kita bahas dibawah ini.

Hipotesisi yang digunakan adalah:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_1 : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari JB hitung $>$ Chi Square tabel, maka H_0 ditolak

Jika hasil dari JB hitung $<$ Chi Square tabel, maka H_0 diterima

3.5.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang *perfect* atau *exact* diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk menjelaskan pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bias terdeteksi keberadaanya bila R^2 dari *auxiliary regression* melebihi R^2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu, pengujian ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai

tolerance dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013).

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tidak bebas (Y_i) meningkat sebagaimana meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka variabel Y_i adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data *cross section* dari pada *time series*. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan melalui pengamatan pola pada grafik *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) dengan residualnya. Model regresi dikatakan heteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.5.4.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Autokorelasi lebih sering

terjadi pada data time series. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Durbin-Watson test*. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian pada nilai *Durbin-Watson (D-W)* untuk mendeteksi adanya korelasi dalam setiap model dengan ketentuan sebagai berikut (dengan *level of significant* yang digunakan dalam penelitian adalah 5%):

1. DW bernilai dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif
2. DW berada diantara -2 dan +2 berarti tidak terjadi autokorelasi
3. DW bernilai diatas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif.

3.6 Pengujian Hipotesis

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Gujarati, 2003). Menurut Ghazali (2013) ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fitnya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikatnya. Nilai R^2 berkisar antara nol

dan satu. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Gujarati, 2003).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

3.6.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau koefisien bernilai negatif maka hipotesis alternatif ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% dan koefisien bernilai positif maka hipotesis alternatif diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Pengujian hipotesis ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis 5%.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari belanja bidang infrastruktur, belanja bidang pendidikan dan belanja bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Lampung dengan tahun amatan 2009 sampai dengan 2015. Berdasarkan hasil dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Belanja bidang infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Belanja bidang pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama dan dua tahun berikutnya. Hal ini diduga dikarenakan realisasi belanja bidang pendidikan banyak menumpuk diakhir tahun, sehingga dampaknya tidak langsung dilihat di tahun berjalan.
- c. Belanja bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris terkait pengaruh belanja bidang infrastruktur, belanja bidang pendidikan dan belanja bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada kabupaten/kota di provinsi Lampung. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan antara lain sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya mengambil belanja fungsi infrastruktur, fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan sebagai variabel independen;
- b. Objek penelitian terbatas pada 10 kabupaten/kota di provinsi Lampung dan rentang waktu hanya tujuh tahun.
- c. Data belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan pada penelitian ini masih mencakup belanja pegawai.

5.3 Saran

- a. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang berasal dari komponen belanja pemerintah berdasarkan fungsi;
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel wilayah yang diteliti dengan penggunaan data sekunder yang lebih besar dan perpanjangan rentang tahun pengamatan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan kesimpulan yang lebih komprehensif.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan agar mengeluarkan komponen belanja pegawai dari data belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Abdullah, S. dan Halim A. 2006. "Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2/2. pp. 17-32
- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Anitasari, Merri & Ahmad Soleh. 2015. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu". *Ekombis Review*. Vol. 2/3. pp. 117-127
- Babatunde, Shakirat Adepeju. 2016. "Government Spending on Infrastructure and its Relationship with Economic Growth – Evidence from Lagos State, Nigeria under Governor Akinwunmi Ambode". *Academy of Contemporary Research Journal*. Vol. 5. pp. 16-25.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung 2015*. Lampung.
- Bakare, A.S dan Sanmi Olubokun. 2011. "Health Care Expenditure and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Study". *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*. Vol. 2/2. pp. 83-87.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review". *The Academy of Management Review*. Vol. 1/14. pp. 57-74.
- Friawan, Deni. 2008. "Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia". *CSIS* Vol.2/37. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gujarati, Damodar N. 2003. "Ekonometri Dasar". Terjemahan: Sumarno Zain. *Jakarta: Erlangga*.
- Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C. 2009. "Dasar-Dasar Ekonometrika." *Jakarta: Penerbit Salemba Empat*.
- Hamzah, Ardi. 2008. "Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)". *Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak*.

- Harianto, David & Priyo Hari Adi .2007. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita”. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Hendarmin. 2012. “Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat”. *Jurnal EKSOS*. Vol. 3/8. pp. 144-155.
- Hood, Christopher. 1991. “A Public Management for All Seasons?”. *Public Administration*. Vol. 69. pp. 3-19.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. “The political economy of public expenditures”. *Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The World Bank.
- Liu, Chi-Hung Louis, Chiehwen Ed Hsu dan Mustafa Z. Younis. 2008. “The Association between Government Expenditure and Economic Growth: Granger Causality Test of US Data, 1947~2002”. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Vol. 4/20. pp. 439-452.
- Mahmudi. 2003. “New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik”. *Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen*. Vol. 1/6. pp. 69-76.
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., dan Myrnawati Savitri. 2014. “Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol. 17. pp. 62-98.
- Mekdad, Y., Dahmani, A., dan Monir Louaj .2014. “Public spending on education and Economic Growth in Algeria: Causality Test”. *International Journal of Business and Management*. Vol. 3. pp. 55-70.
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman. 2006. “Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan”. *Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia*.
- Nurudeen A, Usman A (2010). “Government expenditure and economic growth in Nigeria, 1970-2008: a disaggregated analysis”. *Business and Economic Journal*. Vol. BEJ-4. pp. 1-11.
- Parwati, Sayu Made. 2015. “Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran di Kabupaten/Kota Se-Bali”. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Udayana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ranis, G., Stewart, F. dan Alejandro Ramirez. 2000. “Economic Growth and Human Development”. *World Development*. Vol. 2/28. pp. 197 - 219.

- Santoso, Sugiarto A., Abubakar Hamzah dan Mohd. Nur Syechalad. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1/4. pp. 76-88.
- Setiyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. "Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 2/4. pp. 211-228
- Sjafii, Achmad. 2009. "Pengaruh Investasi Fisik dan Investasi Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004". *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 3. pp. 59-76.
- Sugiyono. 2016. "Statistika untuk Penelitian". *Bandung: Penerbit Alfabeta*.
- Sukirno, Sadono. 1996. "Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan". *Jakarta: LPFE UI dengan Bina Grafika*.
- Suparno, Heri. 2014. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur". *Ekonomika-Bisnis Vol. 1/5*. Pp. 1-21.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2008. "Pembangunan Ekonomi". *Jakarta: Erlangga*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Vegirawati, Titin. 2012. "Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan)". *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius) Vol. 1/2*. pp. 65-74.
- Widarjono, Agus. 2013. "Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya". *Ekonosia: Jakarta*.
- Widodo, A., Waridin, dan Johanna Maria K. 2011. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah". *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1/1. pp. 25-42.